

**LABUHAN PARANGKUSUMO SEBAGAI IMPLEMENTASI PRAKTIK
POLITIK KEAGAMAAN KESULTANAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF
KONSEP KUASA MICHEL FOUCAULT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh :

ADITYA BAGUS NURUL HUDA

NIM. 17105010039

Pembimbing:

Dr. ALIM ROSWANTORO, M.Ag.

NIP. 19681208 199803 1 002

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156 Yogyakarta
55281

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp. : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aditya Bagus Nurul Huda
NIM : 17105010039
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Labuhan Parangkusumo Sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta Perspektif Konsep Kuasa Michel Foucault

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 November 2021
(Pembimbing)

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Bagus Nurul Huda

NIM : 17105010039

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Labuhan Parangkusumo Sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta Perspektif Konsep Kuasa Michel Foucault”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya dalam penulisan karya ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka penulis siap bertanggung jawab sepenuhnya atas karya yang telah disusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dimengerti.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 November 2021

Yang menyatakan



Aditya Bagus Nurul Huda

NIM. 17105010039



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1452/Un.02/DU/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : LABUHAN PARANGKUSUMO SEBAGAI IMPLEMENTASI PRAKTIK POLITIK
KEAGAMAAN KESULTANAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF KONSEP KUASA
MICHEL FOUCAULT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADITYA BAGUS NURUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 17105010039
Telah diujikan pada : Rabu, 17 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61aeec917bba



Penguji II

Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61add91f63d72



Penguji III

Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61aa2395a2ce9



Yogyakarta, 17 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61af093958f93

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada keluarga, teman dan sahabat, serta para manusia yang senantiasa ingin terus berkembang dalam menjalani persoalan hidup. Baik dalam kondisi senang maupun tidak, akan tetapi tetap selalu berusaha menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

Tidak peduli seberapa lama prosesnya, asalkan tidak berhenti dan terus mau
untuk berusaha, suatu saat pasti akan mencapai tujuan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada setiap makhluk di dunia ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam, agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena kepada beliau kita dapat meneladani perkataan, sikap maupun perbuatan dalam bertaqwa kepada Allah SWT, membangun jiwa spiritualitas manusia, dan memberikan kebermanfaatn hidup kepada sesama manusia.

Skripsi ini merupakan persembahan atas ketertarikan penulis dalam dunia filsafat khususnya filsafat politik. Penulis meyakini pembahasan filsafat politik akan senantiasa menjadi pembahasan menarik dari zaman ke zaman. Hal ini dikarenakan politik sudah biasa digunakan untuk kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan dengan manusia lain. Hingga pada akhirnya penulis membahas dan menyelesaikan penelitian tentang *“Labuhan Parangkusumo Sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta Perspektif Teori Kuasa Michel Foucault”*.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis tidak bisa luput dari adanya hambatan, namun telah mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini, dengan segenap kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terkait, antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nurcholis dan Ibu Siti Muntasiroh, atas curahan kasih dan sayang, dukungan, dan kesabaran kebersamai penulis dalam mendidik dan menemani perkembangan penulis hingga sampai sekarang.
2. Bapak Prof. Dr, Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum., MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Abdul Basir Solissa, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh dunia perkuliahan.
6. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, beliau secara sabar memberikan penulis pengarahan dan membimbing dengan segala kerendahan hatinya baik dalam penulisan skripsi maupun selama penulis menempuh mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer.
7. Bapak Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam sekaligus dosen yang

mengampu beberapa mata kuliah yang sangat berpengaruh dalam memahami penulisan tentang filsafat.

8. Segenap Dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, atas pengetahuan dan bimbingan yang diberikan dalam proses pembelajaran selama penulis menapaki masa perkuliahan.
9. Segenap pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantu dan melancarkan proses administrasi sejak awal penulis menempuh perkuliahan hingga akhir.
10. Segenap abdi dalem Keraton Yogyakarta, KRT Djatiningrat, KRT Rekso Suryo Hasmoro, dan Mas Jajar Ngabdul Suyatno yang telah membantu penulis dan bersedia untuk penulis wawancarai sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap kawan Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2017, terutama Perganas Squad, kepada Alfin, Bima, Dani, Ijar, Anam, Wafi, dan Ojleng, atas kesempatan bercerita, berdiskusi, berjuang bersama, dan saling menyemangati satu sama lain selama penulis merasakan dunia perkuliahan.
12. Segenap kawan KKN Genengmulyo, kepada Shofa, Anam, Arsyad, Yudha, Riska, Nazmi, Miza, dan Ni'am, atas berbagi kisah selama pengabdian serta sumbangan pemikiran dan tenaga kalian untuk pengabdian masyarakat.

13. Sahabat Mahfud Husain, yang telah bersedia membantu, dan ikut merasakan perjuangan atas usahanya dan penulis untuk mendapatkan narasumber yang sesuai dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan. Penulis berusaha dengan sebaik-baiknya dalam melakukan penelitian ini. Namun, sebagai manusia yang masih belajar, penulis tidak bisa luput dari kesalahan dalam menyusun penelitian ini. Menyadari dal tersebut, penulis siap menerima koreksi, kritik, dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga para pembaca bisa mengambil manfaat dari skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Penulis,



Aditya Bagus Nurul Huda

NIM. 17105010039

ABSTRAK

Diskusi mengenai filsafat politik menjadi pembahasan yang menarik. Dilihat dari filsafat yang merupakan ibu atau induk segala ilmu pengetahuan dan sifat politik yang dinamis senantiasa berkembang mengikuti perkembangan jaman membuatnya masih layak dan terus diperbincangkan sampai sekarang. Salah satu tokoh filsafat yang membahas tentang politik adalah Michel Foucault. Di sisi lain, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat praktik politik keagamaan yang telah berjalan dan diteruskan hingga Kesultanan masa sekarang. Salah satunya ialah Labuhan Parangkusumo. Michel Foucault mengatakan jika arah politik tak selamanya buruk, tetapi sebaliknya. Politik dapat memudahkan dan melancarkan setiap aktifitas berkehidupan manusia. Hal demikianlah yang membuat arah praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta akan dilihat menggunakan perspektif Foucault.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan yang juga didukung dengan data-data kepustakaan. Penelitian yang diangkat penulis difokuskan pada Labuhan Parangkusumo sebagai praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta yang akan dijadikan sebagai sumber data primer. Sedangkan untuk sumber data sekunder, didukung dengan kajian tentang teori kuasa Michel Foucault sebagai pisau analisis atau objek formal. Selain itu, sumber sekunder lainnya dapat berupa buku, artikel, serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi dan analisis.

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, terdapat beberapa kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa ada kesesuaian sekaligus ketidaksesuaian antara Labuhan Parangkusumo sebagai praktik politik keagamaan jika dilihat menggunakan teori kuasa Michel Foucault. Ada tiga poin dari praktik politik keagamaan Labuhan Parangkusumo yang sesuai dengan teori kuasa Michel Foucault. Pertama, politik bukanlah milik melainkan strategi. Kedua, kuasa berada di mana-mana, bukan hanya pada satu tempat. Ketiga, kuasa dapat bekerja melalui normalisasi dan regulasi, tidak selalu bekerja dengan penindasan dan represi seperti yang telah dipahami kebanyakan pemikir selama ini.

Kata kunci: Teori Kuasa, Labuhan Parangkusumo, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Michel Foucault.

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN SAMPUL</u>	<u>i</u>
<u>NOTA DINAS</u>	<u>ii</u>
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	<u>iii</u>
<u>PENGESAHAN</u>	<u>iv</u>
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	<u>v</u>
<u>HALAMAN MOTTO</u>	<u>vi</u>
<u>KATA PENGANTAR.....</u>	<u>vii</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>xi</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>xii</u>
<u>DAFTAR GAMBAR.....</u>	<u>xv</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	<u>16</u>
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	22
E. Kajian Pustaka.....	23
F. Kerangka Teori.....	28
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan	34

<u>BAB II TENTANG MICHEL FOUCAULT</u>	<u>36</u>
A. Riwayat Hidup.....	36
B. Pemikiran	43
C. Konsep Arkeologi-Genealogi Michel Foucault.....	45
D. Teori Kuasa	51
<u>BAB III PRAKTIK POLITIK KEAGAMAAN DAERAH ISTIMEWA</u>	
<u>YOGYAKARTA</u>	<u>57</u>
A. Pengertian Politik Keagamaan.....	57
B. Sejarah Praktik Politik Keagamaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	60
1. Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Kemerdekaan.....	61
2. Biografi dan Latar Belakang Sri Sultan Hamengku Buwono X.....	64
C. Labuhan Parangkusumo sebagai Praktik Politik Keagamaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono X.....	71
<u>BAB IV ANALISIS PANDANGAN FOUCAULT TERHADAP PRAKTIK</u>	
<u>POLITIK KEAGAMAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</u>	<u>77</u>
A. Politik Keagamaan Menggunakan Perspektif Foucault	77
1. Kebenaran dan Kekuasaan.....	77
B. Labuhan Parangkusumo sebagai Praktik Politik Keagamaan Dilihat menurut Teori Kuasa Foucault	80

1. Kuasa Bukan Milik melainkan Strategi.....	81
2. Kuasa Terdapat di Mana-mana, Bukan Hanya Satu Tempat.....	82
3. Kuasa Bekerja melalui Normalisasi dan Regulasi.....	83
4. Kuasa Bersifat Produktif, Tidak Destruktif.....	85
<u>BAB V PENUTUP.....</u>	<u>86</u>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
<u>DAFTAR PUSTAKA.....</u>	<u>90</u>
<u>LAMPIRAN.....</u>	<u>95</u>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Michel Foucault seorang pemikir abad ke-20 dari Perancis	35
Gambar 2. Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika dilantik menjadi penerus tahta	61
Gambar 3. Prosesi acara Labuhan Parangkusumo	68
Gambar 4. Kalender pada Bulan Rajab yang dimiliki oleh para abdi dalem keraton Yogyakarta	69



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari individu lainnya. Dalam era modern seperti sekarang, keberlangsungan antar manusia tidak bisa lepas dari politik. Politik diperlukan untuk menjaga kestabilan kehidupan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Politik terus menggejala mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal tersebut, maka manusia inti utama realitas politik, apapun alasannya pengamatan atau analisa politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia.¹ Perkembangan dimaksudkan sebagai perubahan positif yang terjadi dari waktu ke waktu, dalam perkembangan itu adakalanya timbul masalah-masalah.² Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang disebut politik. Politik ini sudah umum terjadi di berbagai wilayah yang ada kehidupan masyarakatnya, baik daerah perkotaan maupun pedesaan.

Yogyakarta sedikit berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia. Penulis tertarik untuk meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta karena sistem pengelolaan wilayahnya meskipun sudah tergabung menjadi bagian Indonesia,

¹ Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*, (Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. XXI, No. 2, 2005) hlm. 262

² Miriam Budiardjo dan Tri Pudjiastuti, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 245

wilayahnya masih menjaga ciri khas daerahnya yang berbentuk Kesultanan Islam, yaitu tahta kepemimpinannya diturun-temurunkan dari silsilah keluarga pendahulunya. Yogyakarta sangat kaya akan sejarah, terlalu luas pembahasan jika penulis tidak memfokuskan ke arah mana atau kapan peneliti membahas tentang kekuasaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis fokus meneliti praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, lebih tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Ada konsep seorang tokoh yang akan penulis usung sebagai perspektif dan tolak ukur bagaimanakah praktik politik keagamaan yang terjadi di Yogyakarta, yaitu teori Michel Foucault tentang kuasa. Michel Foucault mulai memfokuskan pemikirannya tentang kuasa tepatnya pada tahun 1968. Hal ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa bulan Mei 1968 yang merupakan protes dan pemogokan umum atas hal-hal yang telah dilakukan Pemerintahan saat itu hingga menyebabkan jatuhnya Pemerintahan De Gaulle di Prancis. Meskipun tidak secara langsung ikut aksi tersebut karena pada saat itu ia sedang mengajar di Tunis, ibukota Tunisia. Pada waktu itu karyanya yaitu *Arkeologi Pengetahuan* sudah selesai ditulis.

Lalu saat ia memberi kuliah tentang tentang Nietzsche, ia menemukan bahwa apa yang disebut Nietzsche mengenai “genealogi” dalam bukunya *Genealogi dan Moral* sebenarnya cukup dekat dengan maksud dari “arkeologi” yang ia kemukakan, akan tetapi ada unsur dari “genealogi” Nietzsche yang belum

kelihatan dengan jelas dalam penelitiannya sendiri, yaitu kuasa.³ Dari hal itu, Foucault selanjutnya menjadikan kuasa sebagai tema terpenting bagi pemikirannya ke depan, sehingga kita juga dapat melihat bahwa istilah arkeologi tidak lagi dipakainya.

Selama ini banyak yang sudah menulis tentang kuasa, akan tetapi menurut Foucault sedikit sekali yang dapat kita ketahui tentangnya. Kebanyakan mereka yang berbicara tentang kuasa, hanya fokus kepada orang-orang yang berkuasa (seperti: raja-raja dan panglima-panglima) atau tentang lembaga-lembaga yang memiliki kuasa (seperti: Negara, Parlemen, Gereja). Dan justru melupakan bagian yang terpenting, yakni mekanisme-mekanisme kuasa atau strategi kuasa, hal inilah yang pada akhirnya menjadi fokus perhatian Foucault. Foucault ingin menganalisis strategi kuasa yang faktual. Ia tidak menyajikan suatu metafisika tentang kuasa, tetapi suatu mikrofisika, artinya masalahnya bukan pada apakah itu kuasa, melainkan bagaimana berfungsinya kuasa pada suatu bidang tertentu. Kuasa bagi Foucault sama dengan serba banyak relasi kuasa yang bekerja di salah satu tempat dan waktu.⁴

Yogyakarta bisa dikatakan sebagai salah satu bagian yang istimewa di Indonesia. Pada awalnya, Yogyakarta adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan

³ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014) hlm. 309

⁴ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II*, hlm. 310

menurut perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah perjanjian politik 1940. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik, status dan posisi serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah menjadi daerah administrasi khusus dan Sultan menjadi Kepala Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari republik modern.⁵

Setelah secara resmi masuk menjadi bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia, kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta tidak begitu berubah. Masyarakatnya masih mengikuti ajaran lama seperti kebiasaan umum/adat istiadat, kepercayaan, seni, serta pandangan hidup yang masih terus dilakukan hingga sekarang. Salah satunya ialah mereka tetap setia melayani, meyakini, dan menjunjung tinggi pemimpin mereka yaitu Kesultanan Yogyakarta. Contoh pada suatu kasus, kebijakan politik Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami perubahan, misalnya dalam upacara keagamaan Pemerintahan

⁵ P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 3-4

Yogyakarta tetap memiliki tata aturan sendiri dalam menjalankan Pemerintahannya.

Upacara ini disebut garebeg. Dalam bahasa Jawa, garebeg berarti suara angin menderu, mengandung makna mengiring raja, pembesar, atau pengantin.⁶ Ada sejarah lisan yang mengatakan bahwa dahulu kala para raja Jawa selalu menyelenggarakan selamatan kerajaan bertepatan setiap hari besar dalam Islam. Hal inilah yang memelopori tradisi garebeg. Garebeg sendiri biasanya dilaksanakan pada bulan Syawal, Maulud, dan Dzulhijjah.⁷ Dalam peristiwa itu, rakyat datang menghadap raja untuk menyampaikan sembah baktinya.

“Raja keluar dari keraton lalu duduk di singgasana keemasan (*Dhamar Kencana*). Penampilan raja untuk menerima sembah bakti rakyat yang datang menghadap (*sowan*) itu, diiring oleh para putra dan segenap penggawa keraton.”⁸

Ada juga sebuah tradisi sedekah laut yang mana di kalangan lingkup keraton Yogyakarta lebih sering disebut sebagai acara labuhan hajad dalem. Labuhan berasal dari kata *labuh* yang berarti membuang, meletakkan, atau menghanyutkan. Maksud dari labuhan ini adalah sebagai doa dan penghargaan untuk membuang segala macam sifat buruk. Keraton Yogyakarta memiliki empat jenis labuhan dengan jadwal penyelenggaraan yang telah ditentukan di setiap tahunnya. Nama-nama labuhan itu di antaranya Labuhan Parangkusumo, Labuhan Merapi, Labuhan

⁶ B. Soelarto, *Garebeg Di Kesultanan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hlm. 9

⁷ *Mengenal Tradisi Grebeg: Peringatan Hari Besar Islam di Yogyakarta*, dalam <https://pesonaindoensia.kompas.com/read/2019/10/20/131800427/mengenal-tradisi-grebeg-peringatan-hari-besar-islam-di-yogyakarta> (Diakses pada 19 November 2021)

⁸ B. Soelarto, *Garebeg Di Kesultanan Yogyakarta*, hlm. 9-10

Lawu, dan Labuhan Dlepih Khayangan.⁹ Itu semua merupakan salah satu contoh bentuk dari praktik politik keagamaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terlepas dari itu semua, bagaimana atau seperti apa sikap politik yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta selama ini. Sangat menarik jika melihat apa yang terjadi di lingkungan Yogyakarta yang masyarakatnya masih menujunjung tinggi budaya dan adat mereka. Kesultanan dilihat memiliki sikap-sikap politiknya sendiri. Ada hal yang perlu digarisbawahi mengenai sikap politik di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dalam aspek apa. Penulis memfokuskan penelitian ini pada aspek politik keagamaan yaitu titah Sultan untuk tradisi labuhan hajad dalem yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta pada masa sekarang ini. Pada dasarnya masyarakat Yogyakarta sangat taat, patuh, dan percaya kepadanya, kepemimpinannya sangat dihargai oleh masyarakat Yogyakarta. Ini merupakan sebab dari kuasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkajinya dengan menggunakan Foucault dengan pemikiran tentang kuasa yang dikemukakannya untuk melihat bagaimanakah praktik politik keagamaan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

⁹ <https://www.kratonjogja.id/hajad-dalem/2/hajad-dalem-labuhan> (Diakses pada tanggal 2 Juni 2021)

1. Bagaimana praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta dalam Labuhan Parangkusumo?
2. Bagaimana praktik politik keagamaan tersebut dalam perspektif teori kuasa Michel Foucault?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar kita mengetahui praktik politik keagamaan yang dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta jika dilihat dari sudut pandang pemikiran Michel Foucault, tujuan lainnya yaitu memahami hal-hal dalam lingkup Kesultanan Yogyakarta yang telah dijalankan selama ini, yang mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dan terlebih penting lagi bagaimana bentuk praktik politik keagamaan di Yogyakarta itu seperti apa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, manfaat penulisan di antaranya, yaitu agar pembaca atau khalayak mengerti tentang bagaimana sebenarnya praktik politik keagamaan yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta selama ini. Tidak hanya itu, manfaat lain dari penelitian ini juga memberikan gambaran kepada para pembaca

tentang sisi positif berpolitik menurut Foucault, politik bukan suatu hal yang buruk.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, tentunya diperlukan pemahaman dan pendalaman terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah ada dan dilakukan sebelumnya. Berikut kajian pustaka yang telah penulis kumpulkan beserta penjelasan singkat dan perbedaannya satu sama lain.

Tentang praktik politik keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis menemukan beberapa penelitian yang menurut penulis berhubungan dan menyinggung dalam penelitian yang penulis bahas.

1. “Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Tentang Suksesi Kekuasaan Dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat” oleh Alvin Noor Sahab Rizal yang berisi tentang serangkaian Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono yang mendapatkan wahyu kalau Yogyakarta akan masuk pada zaman baru dan Sultan sendiri berkewajiban menjalankan ajaran yang diwariskan dari leluhurnya.¹⁰ Berbeda dengan apa yang saudara Alvin tulis, penulis lebih menekankan pada praktik kekuasaan politik keagamaan yang dilakukan

¹⁰ Alvin Noor Sahab Rizal, *Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Tentang Suksesi Kekuasaan Dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

oleh Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang bagaimanakah sikap atau kebijakan Sultan itu sendiri, dan lebih mengarah kemana praktik politik keagamaan yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta, dengan menggunakan perspektif atau konsep yang diusung oleh Michel Foucault. Berbeda dengan skripsi saudara Alvin Noor Sahab Rizal yang pada dasarnya menekankan pada suksesi kekuasaan dalam keraton Yogyakarta

2. “Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945-1955” oleh Moch Asichin dan Yety Rochwulaningsih yang berisi tentang gambaran dan analisis bagaimana perkembangan demokratisasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artikel ini mengkaji perkembangan demokratisasi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak bergabungnya Kraton Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945.¹¹ Penelitian yang penulis kaji berhubungan dengan artikel ini, tetapi penulis lebih memfokuskan pada kekuasaan dan sikap-sikap politik keagamaan yang terjadi pada ruang lingkup keraton yaitu Kesultanan Yogyakarta.
3. “Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton” oleh Riski Williyanto, yang berisi tentang analisa dengan menggunakan teori patrimonialisme untuk menganalisa studi kasus terkait reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah

¹¹ Moch Asichin dan Yety Rochwulaningsih, *Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945-1955*, (Indonesian Historical Studies, Vol. 2, No. 1, 2018) hlm. 13

Istimewa Yogyakarta yang disebabkan oleh adanya implikasi budaya politik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.¹² Berbeda dengan topik yang penulis angkat, penulis lebih memfokuskan pada implementasi praktik politik keagamaan yang telah dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta selama ini.

4. “Elit, Culture Capital, Dan Sabda Raja Dalam Sukses Kepemimpinan DIY Di Keraton Maupun Gubernur” oleh Muhammad Abdul Rahim, skripsi ini membahas mengenai sabda-sabda Raja yang dijadikan sebagai titah dalam menjalankan kepemimpinan yang ada di lingkup keraton maupun sebagai gubernur di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³ Jurnal yang telah ditulis oleh Muhammad Abdul Raim ini berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, oleh karena itu penulis akan menggunakan skripsi ini sebagai salah satu referensi. Masih berbeda dengan penelitian di atas, penulis menggunakan Michel Foucault sebagai perspektif atas praktik politik keagamaan yang ada pada Labuhan Parangkusumo di masa Sri Sultan Hamengku Buwono X.
5. “Perubahan Keistimewaan Sultan Yogyakarta: Wacana Politik Identitas” oleh Arie Toursino Hadi, Shinta Arjuna Saputri, dan Nurtikawati. Jurnal ini membahas mengenai perubahan keistimewaan kekuasaan Kesultanan

¹² Riski Williyanto, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015, hlm. ii

¹³ M. Abdul Rahim, *Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY*, (In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 1, 2017) hlm. 201

Yogyakarta Hadiningrat dilihat dari wacana politik identitas. Penelitian ini melihat sejauh mana pergeseran makna masyarakat baik yang berada di dalam maupun luar Daerah Istimewa Yogyakarta memandang keistimewaan politik yang dimiliki oleh Sultan Yogyakarta.¹⁴ Perbedaan dengan yang penulis bahas terletak pada objek formalnya yaitu menggunakan perspektik konsep kuasa Michel Foucault.

6. “Kesultanan di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik: Studi tentang Pemaknaan Masyarakat terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta” oleh Meyrza Ashrie Tristyana, penelitian ini mengkaji tentang pemaknaan terhadap eksistensi kesultanan di Yogyakarta oleh masyarakat pluralistik di daerah tersebut yang tidak hanya membawa implikasi pada pluralitas masyarakat itu sendiri, melainkan juga pada keseluruhan bagian dari Yogyakarta, termasuk kesultanan dan pemerintahan.¹⁵ Sudah terlihat jelas berbeda dengan topik yang penulis angkat.
7. “Otoritas Kesultanan Yogyakarta Dalam Mempengaruhi Sistem Pemerintahan DIY” oleh Katia Fredelis Irro berisi tentang DIY yang merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dikepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Kepala Daerah dan Sri Paku Alam

¹⁴ Arie Toursino Hadi, Shinta A. Saputri, dkk, *Perubahan Keistimewaan Sultan Yogyakarta: Wacana Politik Identitas*, (Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya, Vol. 2, No. 2, 2019) hlm. 59

¹⁵ Meyrza Ashrie Tristyana, *Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik: Studi tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta*, (Jurnal Politik Muda, Vol. 2, No. 1, 2012) hlm. 252

sebagai wakil daerah DIY. Sumber hukum daripada DIY¹⁶ adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Undang-undang yang membentuk DIY sebagai daerah otonom setingkat provinsi adalah Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁷ Perbedaan yang dapat diketahui dari pembahasan yang penulis angkat ada pada fokus kajian dan objek formalnya.

8. “Garebeg Di Kesultanan Yogyakarta” oleh B. Soelarto, berisi tentang suatu upacara yang telah diselenggarakan selama berabad-abad dan hingga kini masih dilestarikan oleh Keraton Kesultanan Yogyakarta. Dalam garebeg banyak terungkap unsur-unsur kebudayaan lama di Nusantara seperti religi, bahasa, kesenian dan adat-istiadat. Dalam penyelenggaraannya, dapat disaksikan wujud dari gagasan-gagasan serta alam pikiran religius leluhur. Berbagai ungkapan simbolis dalam garebeg sesungguhnya banyak

¹⁶ Singkatan dari “Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta Lihat: P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 3-4

¹⁷ Fredelis Irro Katia, *Otoritas Kesultanan Yogyakarta Dalam Mempengaruhi Sistem Pemerintahan DIY*, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, 2016, hlm. xii

mengandung nilai-nilai sosial-budaya yang sudah terbukti sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan, keselarasan kehidupan masyarakat dari masa ke masa.¹⁸

Dari tinjauan di atas, penulis belum menemukan penelitian yang fokus melihat praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta yang akan penulis kaji dengan menggunakan perspektif konsep atau teori kuasa Michel Foucault. Dari tinjauan pustaka di atas pula, penulis menjamin otentisitas dan orisinalitas penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teoritik merupakan model konseptual dari suatu teori atau hubungan logis di antara faktor-faktor yang diidentifikasi penting pada masalah penelitian.¹⁹ Mengenai Teori Kekuasaan Michel Foucault, penulis menemukan pokok dari konsep kekuasaan yang diusung oleh Michel Foucault sendiri. Dari apa yang telah penulis baca, arah politik menurut Foucault tidak selamanya berarti buruk. Ada 4 poin penting dari pandangan-pandangan Foucault tentang kuasa, yaitu:

1. Kuasa bukan “milik” melainkan “strategi”.²⁰

¹⁸ B. Soelarto, *Garebeg Di Kesultanan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hlm. iii

¹⁹ Fahrudin Faiz, Robby Habiba Abror, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) hlm. 10

²⁰ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014) hlm. 311

Selama ini kuasa dianggap sebagai sesuatu yang dapat diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah, atau dikurangi. Tetapi dalam pandangan Foucault kuasa tidak memiliki, tetapi dipraktikkan dalam satu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

2. Kuasa tidak dapat dilokalisasikan tetapi terdapat dimana-mana.²¹

Kebanyakan pemikir sebelumnya memahami kuasa harus dikaitkan dengan orang atau lembaga tertentu, khususnya aparat Negara. Tetapi menurut Foucault strategi kuasa berlangsung dimana-mana. Dimana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, dimana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan dengan dunia, di situ pun kuasa sedang bekerja.

3. Kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi.²²

Kuasa diidentikkan dengan subjek yang berkuasa (raja, pemerintah, ayah, laki-laki, dan kehendak umum) dan subjek itu dianggap melarang, membatasi, menindas, dan sebagainya. Menurut Foucault kuasa tidak bersifat subjektif. Pada kenyataannya kuasa memproduksi. Kuasa memproduksi realitas; kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran.

²¹ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II*, hlm. 311

²² K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II*, hlm. 312

4. Kuasa tidak bersifat “destruktif” melainkan “produktif”.²³

Kuasa tidak menghancurkan tetapi menghasilkan sesuatu. Tidak jarang ditemui pendapat bahwa kuasa itu sendiri sesuatu yang jahat dan harus ditolak. Tetapi menolak kuasa termasuk strategi kuasa itu sendiri. Tidak mungkin memilih tempat di luar kawasan strategi itu. Kuasa itu produktif; kuasa memungkinkan segala sesuatu.

G. Metode Penelitian

Metode yang dikembangkan dan digunakan dalam suatu penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti.²⁴ Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pemahaman secara mendalam.²⁵ Jenis metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang relevan bagi penelitian filsafat, filsafat merupakan suatu sistem yang bersifat dinamis. Bagi ilmu filsafat, metode penelitian memang merupakan suatu wacana yang bersifat dinamis, mengingat luasnya bidang kajian ilmu filsafat. Sementara ahli filsafat berpendapat bahwa dalam suatu karya ilmiah filosofis, yang berupa skripsi, tesis maupun disertasi metode penelitian filsafat tidak perlu dirumuskan secara praktis mengingat objek filsafat tidak semata-mata data empiris, sehingga metode dalam

²³ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II*, hlm. 314

²⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005) hlm.

²⁵ *Mengenal Jenis-Jenis Metode Penelitian*, dalam <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/jenis-metode-penelitian-2566/> (Diakses pada 31 Maret 2021)

penelitian filsafat akan ditemukan sendiri dalam proses penyusunan karya ilmiah tersebut.²⁶

Penulis menggunakan analisis secara reflektif dan mendalam bagaimana konsep kekuasaan yang telah diusung Michel Foucault. Penelitian penelahan teks juga dihubungkan dengan realitas beberapa kasus yang berkaitan dengan praktik kekuasaan politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta. Metode Penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga mencapai hasil maksimal dan optimal. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur, tidak hanya itu sumber-sumber juga dapat diperoleh dari informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan kata lain penelitian yang difokuskan pada kajian yang bersumber pada data-data yang dapat diperoleh buku-buku kepustakaan dan informan.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada praktik yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta yang diperkuat dengan studi kasus dan kepustakaan. Data pustaka kemudian dijadikan sebagai objek formal penelitian. Sedangkan objek material penelitian mengacu pada sikap atau kebijakan-kebijakan politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta itu sendiri.

1. Sumber Data

²⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, hlm 7

a. Data Primer

Data utama yang digunakan sebagai rujukan adalah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian mengenai Labuhan Parangkusumo, informasi dari informan yang akan menjelaskan tentang Praktik Politik Kesultanan Yogyakarta. Data dokumentasi meliputi data sejarah yang dimiliki oleh pihak informan, sedangkan fotografi dapat diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Pihak informan di sini ialah para abdi dalem, khususnya yang berwenang untuk memberikan informasi mengenai topik yang diangkat penulis. Para abdi dalem yang diwawancarai ada tiga orang, yaitu: KRT Djatiningrat, KRT Rekso Suryo Hasmoro, dan Mas Jajar Ngabdul Suyatno. Dan tak luput juga tulisan-tulisan karya Michel Foucault.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang didapat dari studi sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber baik buku, skripsi, jurnal, makalah, artikel, maupun website resmi yang membahas mengenai Labuhan Parangkusumo dan politik Kesultanan Yogyakarta, serta tulisan-tulisan tentang pemikiran Michel Foucault.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data, mengumpulkan data berupa buku, artikel, jurnal, makalah laporan penelitian dan yang berhubungan dengan objek yang penulis bahas. Di

sini penulis mengambil yang berkaitan dengan Labuhan Parangkusumo, Politik Kesultanan Yogyakarta, dan Teori Kuasa Michel Foucault.

- b. Pengumpulan data juga dari wawancara terhadap narasumber. Metode wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur berarti wawancara yang berlangsung mengacu pada satu serangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.²⁷
- c. Klasifikasi data, mengelompokkan data. Di dalam sebuah wawancara tidak semua informasi yang didapat sesuai dengan topik pembahasan. Oleh karena itu, dibutuhkan klasifikasi data untuk memasukkan data yang diperoleh agar sesuai dengan pembahasan yang difokuskan penulis.
- d. Analisis data, menganalisis semua data dengan unsur yang penulis perlukan. Analisis data merupakan bagian penting dalam menyusun suatu karya agar penulis dapat menemukan dan mengetahui keadaan sebenarnya suatu persoalan.
- e. Interpretasi data, menginterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Dengan melakukan interpretasi data, penulis dapat menjelaskan pandangan atau kesimpulan mengenai hasil yang akan ia tulis.

²⁷ Winsky, *Belajar Teknik Asesmen Risiko: Wawancara Terstruktur atau Semi-Terstruktur*, dalam <https://irmapa.org/belajar-teknik-asesmen-risiko-wawancara-terstruktur-atau-semi-terstruktur-structured-semi-structured-interview-ssi/> (Diakses pada tanggal 8 November 2021)

3. Kerangka Teori dan Metode Analisis

Teori kekuasaan Michel Foucault diuraikan di sini dijadikan sebagai kerangka teori dan sekaligus sebagai analisis. Dari data penelitian mengenai praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta yang telah dipaparkan, kemudian dianalisis dengan pendekatan penelitian atau metode analisis filsafat. Analisis filsafat dalam penelitian ini menggunakan metode filsafat pemikiran Michel Foucault, yaitu tentang konsep kuasa. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan terhadap adanya keterhubungan dari data-data yang telah diperoleh. Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara bertahap dan kesimpulan dapat berubah hingga penelitian ini telah final atau penelitian ini berakhir.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah penjabaran teori, yang menjelaskan lebih dalam mengenai konsep politik yaitu tentang kuasa menurut Michel Foucault, dari awal mula pemikiran itu lahir, hingga pengaruhnya pada kondisi sosio-politik di Perancis pada masa itu.

Bab ketiga, menjelaskan tentang bagaimana perkembangan kepemimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta secara historis pasca kemerdekaan hingga masa sekarang, serta bagaimana bentuk dari Labuhan Parangkusumo sebagai salah satu praktik politik keagamaan yang telah dilakukan atau dijalankan oleh Kesultanan Yogyakarta selama ini.

Bab keempat, adalah analisis, yang berisi tentang hasil dari analisis mengenai praktik politik keagamaan dalam bentuk Labuhan Parangkusumo yang telah dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta dengan menggunakan perspektif Michel Foucault tentang kuasa.

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian yang menyangkut *Labuhan Parangkusumo sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta menggunakan Perspektif Michel Foucault*, terdapat dua pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini yang bisa dijawab, yaitu:

1. Tentang Labuhan Parangkusumo sebagai salah satu praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta, praktik ini berjalan sebagai mana mestinya. Maksudnya ialah Labuhan Parangkusumo telah memiliki serangkaian acara yang sudah terstruktur dan setiap acara memiliki makna masing-masing. Di dalam upacara Labuhan Parungkusumo, setiap abdi dalem memiliki tugas-tugasnya sendiri dan memiliki peran yang sama pentingnya dengan Sultan. Praktiknya sendiri tetap berjalan sampai sekarang, meskipun terdapat pihak-pihak masyarakat menentang, upacara ini tetap dilaksanakan. Menurut penulis, pihak masyarakat yang menentang belum mengetahui apa makna dan tujuan sebenarnya upacara Labuhan Parangkusumo. Jika kita lihat lebih jauh, upacara Labuhan Parangkusumo merupakan praktik politik keagamaan yang sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi tradisi turun-temurun hingga sampai

pada masa sekarang yaitu Kesultanan Yogyakarta yang ke-10. Budaya dan warisan leluhur harus tetap dilestarikan agar tidak hilang. Karena hal tersebut dapat menggambarkan ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Terdapat *empat* hal pokok kuasa dari pandangan Foucault yang digunakan sebagai analisis dari praktik politik keagamaan yakni Labuhan Parangkusumo. *Pertama*, bahwa kuasa bukanlah milik melainkan strategi. Bisa dikatakan, Labuhan Parangkusumo adalah bentuk dari gagasan Foucault yang pertama ini. Di sana terdapat berbagai pihak yang terkait dan memiliki peran dan tugas masing-masing yang sama pentingnya. *Kedua*, kuasa terdapat di mana-mana, bukan hanya pada satu tempat. Menurut Foucault praktik kuasa dapat berlangsung di mana saja. Di mana ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan juga dengan dunia, di situ pun kuasa sedang bekerja. Dalam praktiknya, Labuhan Parangkusumo memiliki hubungan itu semua. Hubungan antar manusia yang di situ ada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan para abdi dalemnya, serta hubungan dengan alam yang diaplikasikan pada salah satu tujuan diadakannya Labuhan Parangkusumo yaitu menyelaraskan dan memperindah alam. *Ketiga*, kuasa bekerja melalui normalisasi dan regulasi. Pada dasarnya upacara Labuhan Parangkusumo adalah bentuk dari kuasa yang bekerja pada normalisasi dan regulasi. Hal ini dapat dilihat dari awal hingga akhir proses upacara Labuhan Parangkusumo ini berlangsung. Sultan dengan bijak menggunakan kuasa yang dimilikinya cenderung untuk membagi tugas-tugas

dalam melaksanakan prosesi upacara Labuhan Parangkusumo tanpa ada upaya penindasan. Para abdi dalem dengan sukarela mengikuti apa yang telah ditetapkan Sultan serta memahami tugas mereka masing-masing.

Keempat, kuasa bersifat produktif, tidak destruktif. Jika dilihat dari sejarahnya, upacara Labuhan Parangkusumo merupakan suatu tradisi praktik keagamaan yang telah diwariskan dari para pendahulu Sultan sebelumnya. Praktik politik keagamaan dengan Labuhan Parangkusumo ini tidak berada pada keduanya, yakni tidak bisa dikatakan produktif, tidak pula destruktif, karena ini merupakan praktik politik keagamaan yang diturunkan. Ia lebih berada pada posisi tengah-tengah diantara konsep kuasa Foucault yang keempat ini.

Terlepas dari itu semua, praktik politik keagamaan yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X khususnya pada praktik upacara Labuhan Parangkusumo mendekati dengan empat poin penting tentang kuasa yang diklasifikasikan oleh Michel Foucault.

B. Saran

Penelitian tentang Labuhan Parangkusumo sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta menggunakan Perspektif Michel Foucault telah selesai. Sebagai pembelajar, penulis sadari masih terdapat banyak kekurangan dalam menyusun tulisan karya ini, baik dari unsur data maupun dari cara pemaparan. Penelitian ini ditulis berdasarkan analisis penulis dengan

kacamata teori kuasa Michel Foucault. Penelitian ini sangat amat terbatas pada Labuhan Parangkusumo sebagai praktik politik keagamaan Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, penulis berharap agar selanjutnya ada penelitian yang menaruh fokusnya pada praktik politik keagamaan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Michel Foucault atau dapat mengkaji salah satunya dengan perspektif yang berbeda sehingga dapat memperkaya dan memperdalam analisis. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat melakukan penelitian filsafat politik dengan jangkauan yang lebih luas dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Khozin, Abdullah Af. *Konsep Kekuasaan Michel Foucault*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No.1, 2012.
- Margantoro, Y.B. Ali Subchi, dkk, *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Rizal, Alvin Sahab, N. *Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Tentang Suksesi Kekuasaan Dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 1, 2013.
- B. Nambo, Abdulkadir dan Muhammad Rusdiyanto, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. XXI, No. 2, 2005.
- Hadi, Tourisno Arie, Shinta Saputri, dkk, *Perubahan Keistimewaan Sultan Yogyakarta: Wacana Politik Identitas*, Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ashrie Tristyana, Meyzra. *Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik: Studi tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta*, Jurnal Politik Muda, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer*, Jakarta: Gramedia, 2014.

- Suwarno, P.J. *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Artha, Arwan Tuti. *Laku Spiritual Sultan Langkah Raja Jawa Menuju Istana*, Yogyakarta: Galang Press, 2009.
- Kali, Ampy. *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, Maumere: Ledalero, 2013.
- Foucault, Michel. *Parrhesia*, terj. Haryanto Cahyadi, Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2018.
- Foucault, Michel. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Michel Foucault*, Paul Robinow (ed.), terj. Arief, Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, terj. cet. Pertama, 2012.
- Waters, Malcom. *Modern Sociological Theory*, London Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Post Modernisme: dalam Teori dan Metode*, Jakarta: PT RajaGafindo Perseda, 2014.
- Davies, Peter. *The American Heretage Dictionary of the English Language*, New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977.
- Suyono, Seno Joko. *Tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman, 2002.

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Asichin, Moch. dan Yety Rochwulaningsih, *Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945-1955*, Indonesian Historical Studies, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Uswah, *Agama dan Politik*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
- Williyanto, Riski. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Abdul Rahim, Muhammad. *Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 1, 2017.
- *Pengertian Agama Menurut Para Ahli*, <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-agama-menurut-para-ahli.html?m=1> Diakses pada 21 September 2021.
- Wikipedia Indonesia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana X](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_X) Diakses pada tanggal 27 Juni 2021.
- Yanti, Syafieh. *Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Perspektif Foucault*, <https://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> Diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

- Al Qurtuby, Sumanto. *Agama, Politik, dan Politik Agama*, <https://amp.dw.com/id/agama-politik-dan-politik-agama/a-19131469> Diakses pada 21 September 2021.
- *Hajad Dalem: Hajad Dalem Labuhan*, <https://www.kratonjogja.id/hajad-dalem/2/hajad-dalem-labuhan> Diakses pada 19 Juli 2021
- Budiardjo, Miriam dan Tri Pudjiastuti, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Faiz, Fahrudin, Robby Habiba Abror, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Irro Katia, Fedelis. *Otoritas Kesultanan Yogyakarta Dalam Mempengaruhi Sistem Pemerintahan DIY*, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, 2016.
- Soelarto, B. *Garebeg Di Kesultanan Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Prawiro, M. *Pengertian Politik: Tujuan, Jenis, dan Beberapa Sistem Politik di Dunia*, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html> Diakses pada 13 September 2021.
- *Mengenal Beberapa Jenis-Jenis Metode Penelitian dalam* <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/jenis-metode-penelitian-2566/> Diakses pada 31 Maret 2021.

- Yearry Panji Setianto, *Michel Foucault: Kekuasaan dan Pengetahuan*,
<https://yearry.wordpress.com/2008/09/26/michel-foucault-kekuasaan-dan-pengetahuan/amp/> Diakses pada tanggal 7 Mei 2021.
- *Labuhan Hajad Dalem* dalam <https://www.kratonjogja.id/hajad-dalem/2/hajad-dalem-labuhan> Diakses pada tanggal 31 Maret 2021.
- *Ulang Tahun Kenaikan Tahtata: Tinggalan Jumenengan Dalem* dalam <https://www.kratonjogja.id/ulang-tahun-kenaikan-tahta/6/tinggalan-jumenengan-dalem> Diakses pada tanggal 21 Mei 2019.
- *Mengenal Tradisi Grebeg: Peringatan Hari Besar Islam di Yogyakarta*, dalam <https://pesonaindoensia.kompas.com/read/2019/10/20/131800427/mengenal-tradisi-grebeg-peringatan-hari-besar-islam-di-yogyakarta> Diakses pada tanggal 19 November 2021

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Aditya Bagus Nurul Huda
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 10 Desember 1999
 Status : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat : Bumirejo, RT 02/RW 01, Juwana, Pati,
 Jawa Tengah
 Domisili : Jln. Petung, Gg. Musholla 1, RT 11/RW 04,
 Depok, Caturtunggal, Sleman, DIY, 55598
 Telepon : 088215323588
 Email : aditya.baguzz.ab@gmail.com



Riwayat Pendidikan:

1. TK PKK Guyangan, Trangkil, Pati : Lulus tahun 2005
2. SD Negeri 1 Guyangan, Trangkil, Pati : Lulus tahun 2011
3. MTS Shirathul Ulum Kertomulyo, Trangkil, Pati : Lulus tahun 2014
4. MA Silahul Ulum Asempapan, Trangkil, Pati : Lulus tahun 2017
5. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017-2021

Pengalaman Organisasi

1. Anggota FORSIMASU Yogyakarta (Forum Silahturahmi Mahasiswa Silahul Ulum) Yogyakarta 2017
2. Anggota IKAMARU Yogyakarta (Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum) Yogyakarta 2017
3. Anggota KMPP Yogyakarta (Komunitas Mahasiswa Pelajar Pati) Yogyakarta 2017